

MAKALAH



KORUPSI DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN PERADILAN DI INDONESIA

Oleh:

Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum



**Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights**

KORUPSI DAN INDEPENDENSI KEKUASAAN PERADILAN DI INDONESIA



DR. M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.HUM

A



KAPITA SELEKTA KORUPSI

KORUPSI



- Discretionary + Monopoly – Accountability
- Abuse of authority
- Crime against humanity and civilization
- *Cultural Genocide* (Pemusnah Peradabandan
Pemusnah Nilai-nilai Kejujuran dan kemanusiaan)
- Crime against nation and state

Akar Korupsi



- Budaya permisivisme, pragmatisme dan hedonisme (mindset/mentalitas serba boleh, ke-disini-kinian dan pemberhala harta)
- Budaya, sistem dan proses politik transaksional
- Konspirasi Black Conglomerate DN/LN dengan Elit Politik dan Birokrasi
- Kerapuhan nilai-nilai agama dalam keluarga
- Menguatnya budaya konsumerisme keluarga dan lingkungan
- Sistem korup (Corruption by design)

Modus dan Jenis Korupsi



- Suap pengadaan barang jasa (% terbesar)
- Perencanaan APBN/P, APBD/P, proyek, peraturan per-UU-an
- Sistem, mekanisme dan proses rekrutmen CPNS dan pejabat negara/pemerintah
- Izin Tata Ruang, pusat bisnis, hiburan, sekolah, rumah sakit dan hotel, HPH, Minerba dan kontrak-kontrak karya/perpanjangan
- Desain infra struktur : FS dan pendekatan dan realisasi
- Mafia hukum, politik, peradilan, judi olahraga
- Transaksi Pilkada, Pileg dan Pilpres
- Korupsi demokrasi dan konstitusi

Hirarki Korupsi



- Corruption by need
- Corruption by greed
- Corruption by design

B



**KONSEP NEGARA BERBASIS
KONSTITUSI**

Tataran Filosofi



- Liberty, peaceful, social justice
- People Sovereignty
- The Rule of Law :
 - based on Democracy
 - based on Human Right

Tataran Teori (A. V. Dicey)



- **Supremacy of the law**
- **Equality before the law**
- **Trial and Law based on people protection**

Tataran Teori Rechtsstaat (F.J. Stahl)



- Human Right
- Separation of Power (Trias Politica)
- Government based on law

Internasional Congress of Jurist, (Bangkok 1965)



- **Adanya proteksi konstitusional**
- **Pengadilan yang bebas dan imparsial**
- **Kebebasan berpendapat dan berserikat**
- **Civic Education**

KARAKTER KORUPSI



- Demoralisasi Pemimpin, Birokrasi, Politisi dan Penegak hukum
- Reduksi sistemik Konstitusi dasar 1945
- *Crime against humanity*
- Demoralisasi rakyat melalui pilkada, pileg dan pilpres
- Kejahatan alam
- Kejahatan terhadap keluarga
- Delegitimasi fungsi negara, sistem hukum dan penegakan hukum

Konstruksi Dakwaan, Tuntutan dan Vonis



- Pengejawantahan (Aktualisasi) Roh Dan Nilai-nilai Ke-ilahian (transcendental) dan kemanusiaan otentik.
- Berkarakter kebenaran dan keadilan substansial
- Berfungsi mendekonstruksi dan men-purifikasi tatanan hukum positif menuju hukum transformatif
- Berjiwa penebus dan pengayom terhadap justisiabelen dan masyarakat

SOLUSI



- Ideologisasi sistemik tafsir otentik UUD 1945, makna The Rule of Law dan kedaulatan ditangan rakyat.
- Perumusan konsep dasar kebijakan negara dan penegakan hukum berbasis UUD 1945
- Transparansi rekrutmen dan promosi aparat penegak hukum serta efektivitas LHKPN by on line
- Perubahan paradigma konsep penegakan hukum pada teori hukum responsif (vide bagan)
- Reorientasi tuntutan dan vonis pada spirit Liberty,peaceful dan Social Justice
- Perubahan paradigma kurikulum FH berbasis transformasi sosial



**Sebaik-baik manusia adalah mereka
yang memberi manfaat teradap
sesamanya.**

**Memberi lebih bermartabat dari pada
menerima.**